



# LAPORAN KINERJA 2024

DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan rencana strategis tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap seluruh jajaran yang berada dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Paringin, 31 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas,



**HERLINA, S. Sos, MM**

Pembina - IV/a

NIP. 19701205 199603 2 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. LATAR BELAKANG .....	1
2. LANDASAN HUKUM.....	1
3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
4. ASPEK STRATEGIS .....	2
5. KONDISI UMUM PERANGKAT DAERAH.....	3
A. ORGANISASI.....	3
B. PERSONALIA .....	6
6. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
1. PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026 .....	8
A. TUJUAN DAN SASARAN .....	8
B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM .....	9
2. RENCANA KERJA 2024 .....	10
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD .....	31
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	41
1. PENGUKURAN KINERJA.....	42
1.1. PENGUKURAN KINERJA TUJUAN.....	42
1.2. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS.....	43
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	44
2.1. PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN.....	44
2.2. INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN .	57
2.3. PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT .....	72
3. REALISASI ANGGARAN .....	82
4. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI .....	93
5. ANALISIS KINERJA LAINNYA.....	110
BAB IV PENUTUP .....	113
LAMPIRAN .....	114

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, melaksanakan rencana strategis dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada dimasyarakat. LKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja yang dicapai lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Semua Unit Kerja mandiri wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

### **2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
7. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 107 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan sebagai tolak ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja yang selanjutnya untuk diambil keputusan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan ditahun yang akan datang.

LKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Kedua, LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (performance improvement) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

### **4. ASPEK STRATEGIS**

Penyusunan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tidak lepas dari tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Industri dan meningkatkan kontribusi perdagangan pada Ekonomi Daerah. hal ini sejalan dengan misi II Kabupaten Balangan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya pendapatan IKM, meningkatnya produktivitas perdagangan dan meningkatnya perlindungan konsumen.

## **5. KONDISI UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **A. ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan nomor 80 tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan mempunyai tugas untuk perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi dan perlindungan kosumen serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Unsur-unsur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:

#### **a. Sekretariat**

Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut:

1. mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program;
2. pengelolaan keuangan;
3. menyelenggarakan urusan umum;
4. pengelolaan asset; dan
5. pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

#### **b. Bidang Perindustrian**

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan:

1. kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
2. pembangunan sumber daya industri; dan
3. sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

#### **c. Bidang Pengembangan Perdagangan**

Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mengoordinasikan, membina,

mengatur serta mengendalikan sarana dan pengembangan perdagangan.

d. Bidang Kemetrolagian dan Stabilitas Harga

Bidang Kemetrolagian dan Stabilitas Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kemetrolagian dan stabilitas harga.

e. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dibentuk untuk:

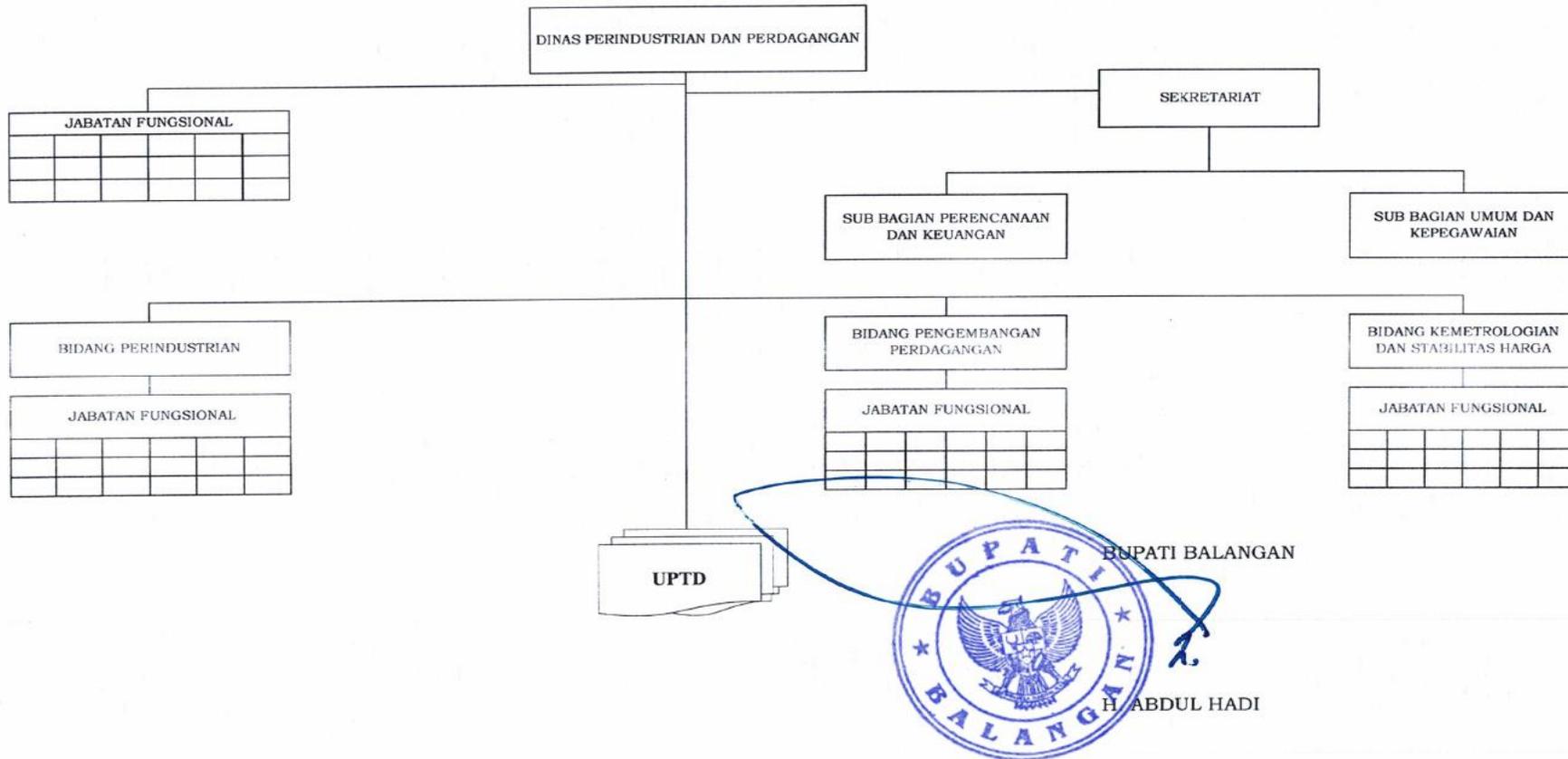
1. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
2. melaksanakan sebagian kegiatan teknis penunjang tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
3. Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BALANGAN  
 NOMOR 55 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI BALANGAN  
 H. ABDUL HADI

## B. PERSONALIA

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah ASN sebanyak 30 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

TINGKAT PENDIDIKAN		GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III / IX	IV	
1	SD	1				1
2	SMP					
3	SMA		5			5
4	D - 1					
5	D - 2					
6	D - 3			4		4
7	D - 4					
8	S - 1			13	1	14
9	S - 2			3	3	6
10	S - 3					
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>30</b>

## 6. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan mengevaluasi kembali unsur penyesuaian renstra atau menguraikan lebih lanjut rumusan tujuan dan sasaran dinas pada penyesuaian renstra tahun 2021-2026 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2024 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh dinas. Adapun sistematika penyusunan LKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. LANDASAN HUKUM
3. MAKSUD DAN TUJUAN
4. ASPEK STRATEGIS
5. KONDISI UMUM PERANGKAT DAERAH
  - A. ORGANISASI
  - B. PERSONALIA
6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

1. PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS 2016-2021
  - A. TUJUAN DAN SASARAN
  - B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

2. RENCANA KERJA 2024
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1. PENGUKURAN KINERJA
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
  - 2.1. PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN
  - 2.2. INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN
  - 2.3. PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT
3. REALISASI ANGGARAN
4. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIEN
5. ANALISIS KINERJA LAINNYA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 1. PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS 2021-2026

#### A. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Adapun Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan tidaklah lepas dari misi II dalam RPJMD Kabupaten Balangan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan tujuan meningkatnya kontribusi PDRB Sektor Industri dan meningkatkan kontribusi perdagangan pada Ekonomi Daerah dengan sasaran meningkatnya pendapatan IKM, meningkatnya produktivitas perdagangan dan meningkatnya perlindungan konsumen. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	5.50	3.84	6.40	6.50	6.60	6.70
		Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	671.41	751.05	791.20	831.35	871.50	911.65
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.1140	0.0567	0.0480	0.0549	0.0567	0.0578
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri		Kontribusi PDRB Sektor Industri	1.90	1.29	1.99	2.00	2.01	2.02
		Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	0	0	1.18	1.68	2.31	2.94

## **B. KEBIJAKAN DAN PROGRAM**

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **1. Kebijakan**

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijakan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan arahan dari pimpinan organisasi. Adapun kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM,
- b. Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri,
- c. Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai pemasaran produk,
- d. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemenuhan SNI 8152:2021,
- e. Peningkatan tujuan ekspor, pembinaan calon pelaku usaha ekspor serta fasilitasi dalam pameran dagang nasional,
- f. Fasilitasi kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi,
- g. Memfasilitasi pelaku usaha dalam perizinan sektor perdagangan,
- h. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta menggelar operasi pasar dalam penanganan inflasi daerah dan penurunan stunting,
- i. Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang serta peningkatan pengawasan metrologi legal dengan penguatan SDM penera.

### **2. Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program-program yang ditetapkan dalam penyesuaian rencana strategis Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
- d. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- e. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- f. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- g. Program Pengembangan Ekspor
- h. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- i. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

## **2. RENCANA KERJA 2024**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun 2024 telah mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 28.023.124.600,00** (*Dua puluh delapan milyar dua puluh tiga juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus rupiah*) dengan target penyerapan anggaran 100,00%. Total anggaran mengalami 30 (tiga puluh) penyesuaian atau penambahan menjadi **Rp 37.870.902.392,00** (*Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*) yang dilakukan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Anggaran sebesar tersebut dialokasikan untuk melaksanakan 9 (sembilan) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Adapun rincian anggaran beserta target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud dapat dilihat sebagai berikut:

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.20	%	5,822,016,400	10,688,745,692	4,866,729,292
		PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%			
		NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	88.30	Nilai SKM			
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	18,000,000	66,227,000	48,227,000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	8,000,000	38,740,000	30,740,000

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	10,000,000	27,487,000	17,487,000
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>4,340,805,500</b>	<b>5,658,832,442</b>	<b>1,318,026,942</b>
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	437	Orang/bulan	4,143,658,360	5,380,019,042	1,236,360,682
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	197,147,140	278,813,400	81,666,260
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>509,520,000</b>	<b>509,520,000</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
		<b>Perangkat Daerah yang Baik</b>					
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang		509,520,000	509,520,000
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Layanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>602,933,700</b>	<b>2,287,824,400</b>	<b>1,684,890,700</b>
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	17,637,600	17,637,600	-
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18	Paket	252,204,900	1,436,544,700	1,184,339,800
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	59,986,200	59,986,200	-

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	56,707,600	56,707,600	-
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	5,000,000	5,000,000	-
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	211,397,400	711,948,300	500,550,900
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>		<b>1,029,795,000</b>	<b>1,029,795,000</b>
12	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	13	Unit		1,029,795,000	1,029,795,000

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
		Jabatan yang Disediakan					
VI	Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	100	%	249,062,850	307,074,500	58,011,650
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	157,199,150	179,861,400	22,662,250
14	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	91,863,700	127,213,100	35,349,400
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	100	%	611,214,350	829,472,350	218,258,000

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
15	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit	243,046,350	256,596,350	13,550,000
16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	Unit	34,270,000	34,270,000	-
17	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	JUmlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	34,000,000	34,000,000	-
18	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	JUmlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	299,898,000	504,606,000	204,708,000
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI</b>	<b>17.85</b>	<b>%</b>	<b>116,750,000</b>	<b>276,750,000</b>	<b>160,000,000</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
		DENGAN KETENTUAN					
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%			
VIII	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	50	Buah	75,600,000	75,600,000	-

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
19	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	75,600,000	75,600,000	-
<b>IX</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<b>3</b>	<b>Buah</b>		<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>
20	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3	Dokumen		60,000,000	60,000,000
<b>X</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri</b>	<b>9</b>	<b>Buah</b>	<b>41,150,000</b>	<b>41,150,000</b>	<b>-</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
21	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9	Dokumen	41,150,000	41,150,000	-
<b>XI</b>	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan	<b>3</b>	<b>Kali</b>		<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
22	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3	Laporan		50,000,000	50,000,000
<b>XII</b>	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)</b>	<b>1</b>	<b>Buah</b>		<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1	Dokumen		50,000,000	50,000,000

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
<b>C</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR</b>	<b>10.00</b>	<b>%</b>	<b>13,654,872,700</b>	<b>13,836,978,700</b>	<b>182,106,000</b>
<b>XIII</b>	<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase Pasar yang direvitalisasi</b>	<b>83.33</b>	<b>%</b>	<b>13,523,673,300</b>	<b>13,688,179,300</b>	<b>164,506,000</b>
24	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	12,224,438,100	11,689,312,700	(535,125,400)
25	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	1,299,235,200	1,998,866,600	699,631,400
<b>XIV</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya</b>	<b>70.00</b>	<b>%</b>	<b>131,199,400</b>	<b>148,799,400</b>	<b>17,600,000</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
26	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	65,599,700	62,819,700	(2,780,000)
27	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	65,599,700	85,979,700	20,380,000
<b>D</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK</b>	<b>7.40</b>	<b>%</b>	<b>757,219,200</b>	<b>1,172,019,100</b>	<b>414,799,900</b>
<b>XV</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>66</b>	<b>Kali</b>	<b>757,219,200</b>	<b>1,172,019,100</b>	<b>414,799,900</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
		<b>Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah</b>	65	Kali			
28	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	126,576,700	241,376,600	114,799,900
29	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	630,642,500	930,642,500	300,000,000
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR</b>	50.00	%	1,973,984,500	2,569,134,000	595,149,500
<b>XVI</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk</b>	<b>Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor</b>	33.33	%	1,973,984,500	2,569,134,000	595,149,500

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
	<b>Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat</b>	5	Pelaku usaha			
30	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	15	Pelaku usaha	1,922,384,500	2,414,957,500	492,573,000
31	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4	Pelaku usaha	51,600,000	154,176,500	102,576,500
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL</b>	<b>7.88</b>	<b>%</b>	<b>50,600,000</b>	<b>51,500,000</b>	<b>900,000</b>
<b>XVII</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Nilai Transaksi Promosi Perdagangan</b>	<b>1,380,000,000</b>	<b>Rp</b>	<b>50,600,000</b>	<b>51,500,000</b>	<b>900,000</b>
		<b>Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas</b>	<b>33.33</b>	<b>%</b>			

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
32	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	50,600,000	51,500,000	900,000
G	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	69.23	%	578,639,200	744,252,700	165,613,500
		PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	25.00	%			
XVIII	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis	1	Orang	578,639,200	744,252,700	165,613,500

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah	1300	Buah			
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan	150	Buah			
33	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	1300	Unit	486,010,700	601,503,700	115,493,000
34	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	50	Orang	92,628,500	142,749,000	50,120,500
<b>H</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>13.00</b>	<b>%</b>	<b>3,937,611,600</b>	<b>7,270,306,500</b>	<b>3,332,694,900</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
XIX	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan	5	IKM	3,937,611,600	7,270,306,500	3,332,694,900
		Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	325	IKM			
35	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1	Dokumen	3,937,611,600	7,270,306,500	3,332,694,900
I	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM</b>	1.98	%	75,530,600	106,805,200	31,274,600

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
XX	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Jumlah IKM yang Memiliki Izin</b>	82	IKM	75,530,600	106,805,200	31,274,600
36	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan	1	Dokumen	75,530,600	106,805,200	31,274,600

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
	Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					
<b>J</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG</b>	<b>1.58</b>	<b>%</b>	<b>1,055,900,400</b>	<b>1,154,410,500</b>	<b>98,510,100</b>
<b>XXI</b>	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI,	Nilai Pemasaran Produk IKM	273.62	Rp	1,055,900,400	1,154,410,500	98,510,100
		Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	146	IKM			

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA		ANGGARAN/ PAGU SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN/ PAGU SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
					(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4		5	6	7
	<b>dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						
37	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	146,400,000	244,910,000	98,510,000
38	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen gasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	909,500,400	909,500,500	100
<b>JUMLAH</b>					<b>28,023,124,600</b>	<b>37,870,902,392</b>	<b>9,847,777,792</b>

### 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024 diarahkan dan dimaksudkan untuk mengukur dan mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan SKPD dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. IKU yang dirumuskan pada tahun 2024 berjumlah 3 (Tiga) indikator dengan rincian sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	<p>a. Makna</p> <p>Menghitung peningkatan perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p> <p>Semakin tinggi peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor akan mencapai sasaran strategis perekonomian</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)</p>	Kepala SKPD	BPS
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	<p>a. Makna</p> <p>Mengukur peningkatan kegiatan perlindungan konsumen di Kabupaten Balangan</p> <p>b. Alasan Pemilihan</p>	Kepala SKPD	Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
			<p>Semakin tinggi pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTPP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah akan menunjukkan nilai baik bagi Index Perlindungan Konsumen</p> <p>c. Perhitungan atau Penjelasan</p> <p>= (A Tahun n - A Tahun n-1) + Nilai mutlak (B Tahun n- B Tahun n-1) + (C Tahun n - C Tahun n-1)</p> <p>Keterangan:  A = Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan  B = Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok  C = Persentase UTPP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah</p>		

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	a. Makna Mengidentifikasi jumlah IKM yang omzetnya meningkat b. Alasan Pemilihan Omzet ikm yang meningkat menjadi tolak ukur keberhasilan dinas c. Perhitungan atau Penjelasan Jumlah IKM yang omzetnya meningkat di tahun n dibagi jumlah IKM di tahun n x 100	Kepala SKPD	Bidang Perindustrian

#### 4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 merupakan komitmen seluruh unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 9 Program prioritas dengan 40 sasaran strategis. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

##### ESSELON II

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	Miliyar Rupiah	831.350
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	Nilai	0.0549
3	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	%	1.68

### ESSELON III

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
11	Meningkatkan Tertib Perijinan Sektor Perdagangan	Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	%	17.85
12	Meningkatnya Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan Dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan	%	100
13	Meningkatkan Sarana Prasarana Perdagangan dalam Kondisi Baik	Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar	%	10.00
14	Meningkatkan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	%	7.40
15	Meningkatnya Pengembangan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor	%	50.00
16	Meningkatnya Tertib Ukur	Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan	%	69.23
17	Meningkatnya Pengawasan Metrologi Legal	Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan	%	25.00
18	Meningkatnya Penerapan Teknologi pada IKM	Persentase IKM yang Menerapkan Teknologi Industri	%	13.00
19	Meningkatnya Pertumbuhan IKM	Persentase Pertumbuhan IKM	%	1.98
20	Meningkatnya IKM yang Berkembang	Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang	%	1.58

## ESSELON IV

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
21	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	1
22	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	3
23	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	9
24	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	3
25	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen	1
26	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	7

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
27	Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	10
28	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1
29	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	1
30	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	12
31	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1
32	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	Pelaku usaha	15
33	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha	4
34	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,	UMKM	20

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
	UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	perhorelan dan jasa akomodasi		
35	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	Unit	1300
36	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	Orang	50
37	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	1
38	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target
	kewenangan pemerintah pusat			
39	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1
40	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Dokumen	1

## SASARAN

- 1 Meningkatkan pendapatan IKM,
- 2 Meningkatkan produktivitas perdagangan dan
- 3 Meningkatkan perlindungan konsumen.

### 1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

#### 1 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

- 1 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

#### 2 Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- 1 Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang

#### 3 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

- 1 Fasilitas Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

#### 4 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- 1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- 5 **Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)**
  - 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
- 2 **PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**
  - 1 **Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**
    - 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
    - 2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - 2 **Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**
    - 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
    - 2 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- 3 **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**
  - 1 **Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**
    - 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
    - 2 Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- 4 **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**
  - 1 **Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
    - 1 Pameran Dagang Nasional
    - 2 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- 5 **PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**
  - 1 **Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**
    - 1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 6 **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**
  - 1 **Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**
    - 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
    - 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 7 **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**
  - 1 **Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota**
    - 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- 8 **PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**

- 1 **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**
  - 1 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
- 9 **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**
  - 1 **Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
    - 1 Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
    - 2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan serta hasil (outcome) yang dicapai.

LKIP 2024 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*) dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA</b>	<b>KRITERIAN PENILAIAN REALISASI KINERJA</b>
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIAN PENILAIAN REALISASI KINERJA
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

## 1. PENGUKURAN KINERJA

### 1.1. PENGUKURAN KINERJA TUJUAN

Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara rata-rata capaian kinerja tujuan adalah sebesar **63.50%** yang dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh kinerja tujuan. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja tujuan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1						
Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	6.50	4.16*	64.00	6.70	62.09
Tujuan 2						
Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Kontribusi PDRB Sektor Industri	2.00	1.26*	63.00	2.02	62.38
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>63.50</b>		

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada di atas dapat diketahui 2 (dua) target tersebut capaian realiasi berada dibawah 100%; Selain itu, indikator kinerja Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Kontribusi PDRB Sektor Industri masih menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Balangan.

## 1.2. PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan kinerja tahun ke-4 pada periode Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar **145.94%** yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran Strategis 1</b>						
<b>Meningkatnya Produktivitas Perdagangan</b>						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(%)	(Miliar Rupiah)	(%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	831.350	867.760*	104.38	911.650	95.19

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

<b>Sasaran Strategis 2</b>						
<b>Meningkatnya Perlindungan Konsumen</b>						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026

		(Nilai)	(Nilai)	(%)	(Nilai)	(%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0549	0.1275	232.24	0.0578	220.59
<b>Sasaran Strategis 3</b> Meningkatnya Pendapatan IKM						
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.68	1.70	101.19	2.94	57.82
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>145.94</b>		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada di atas dapat diketahui, target dengan capaian realiasi diatas 100% sebanyak 3 target; Selain itu, indikator kinerja peningkatan volume perdagangan masih menggunakan realisasi tahun 2023, karena hasil pengukuran realisasi tahun 2024 belum dirilis oleh BPS Kabupaten Balangan.

## 2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

### Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Produktivitas Perdagangan

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Perdagangan” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Miliar Rupiah)	Realisasi (Miliar Rupiah)	Capaian (%)
1	Peningkatan Volume Perdagangan	831.350	867.760*	104.38

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

### 2.1. PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN

Indikator kinerja ini digunakan untuk menghitung peningkatan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor

Peningkatan Volume Perdagangan = Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)

Peningkatan Volume Perdagangan = 867.760 Miliar Rupiah

Hasil capaian Peningkatan Volume Perdagangan adalah 867.760 Miliar Rupiah. Merupakan hasil dari Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) hasil perhitungan BPS tahun 2023.

Untuk memenuhi target indikator Peningkatan Volume Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan Infrastruktur Pasar

Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pasar Pemerintah, seperti revitalisasi pasar, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, dan meningkatkan aksesibilitas pasar. Hal ini dapat menarik lebih banyak pedagang dan konsumen, yang pada akhirnya meningkatkan volume perdagangan.

2. Mempromosikan Penggunaan Sistem E-Commerce

Mempromosikan penggunaan platform e-commerce untuk mempermudah transaksi perdagangan, baik untuk pelaku usaha kecil maupun menengah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat menyelenggarakan promosi dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk memanfaatkan platform digital.

3. Penyuluhan kepada Pelaku Usaha

Memberikan penyuluhan kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM tentang cara meningkatkan kualitas produk, manajemen bisnis dan strategi pemasaran yang efektif. Hal ini bertujuan agar produk yang dipasarkan dapat bersaing di pasar yang lebih luas.

4. Promosi dan Pameran Produk Daerah

Mengadakan kegiatan promosi, seperti pameran atau bazar, yang melibatkan produk lokal dari berbagai sektor, seperti hasil pertanian, kerajinan, dan produk industri lainnya. Promosi seperti ini dapat menarik pembeli dan meningkatkan volume perdagangan.

5. Pengembangan Jaringan Distribusi

Membangun dan memperluas jaringan distribusi untuk memudahkan akses produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik secara regional maupun nasional. Hal ini mencakup

peningkatan sistem logistik dan kerja sama dengan distributor serta pengecer.

#### 6. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Mendorong kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan perusahaan atau sektor swasta lainnya untuk membuka peluang pasar baru dan meningkatkan penjualan produk daerah.

Kegiatan-kegiatan tersebut, yang berfokus pada peningkatan kualitas produk, akses pasar dan efisiensi distribusi, dapat mendukung tercapainya target indikator peningkatan volume perdagangan di Kabupaten Balangan pada tahun 2024.

Untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian indikator peningkatan volume perdagangan pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat melakukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa diambil:

##### 1. Peningkatan Infrastruktur Pasar

Meningkatkan infrastruktur pasar dengan fasilitas yang lebih modern dan memadai, seperti sistem pembayaran digital dan area pemasaran yang lebih luas untuk pedagang.

##### 2. Peningkatan Akses Pasar Melalui E-Commerce dan Digitalisasi

Terus mendorong pelaku UMKM untuk memanfaatkan e-commerce dan platform digital, dengan memberikan pendampingan dan akses ke marketplace yang lebih luas.

##### 3. Peningkatan Kerja Sama dengan Sektor Swasta dan Pemerintah Daerah Lain

a. Kemitraan Strategis: Meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta, baik itu perusahaan besar, distributor, maupun pengecer, untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar luar negeri.

b. Penguatan Kerja Sama Antar Daerah: Membina kerja sama dengan daerah lain untuk membangun jaringan distribusi yang lebih luas dan memperkenalkan produk daerah Balangan ke pasar yang lebih besar.

##### 4. Promosi dan Branding Produk Lokal

- a. Kampanye Promosi yang Lebih Masif, mengintensifkan promosi melalui berbagai saluran, baik online maupun offline, termasuk media sosial, pameran, dan bazar. Fokus pada kampanye branding yang menonjolkan keunggulan dan ciri khas produk lokal Balangan.
- b. Menentukan produk-produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar, lalu memfokuskan upaya pemasaran untuk menjangkau pasar nasional dan internasional.

5. Inovasi Produk

Riset dan Pengembangan dengan mengarahkan perhatian pada inovasi produk untuk meningkatkan daya saing, seperti mengembangkan produk turunan baru dari hasil pertanian atau kerajinan yang lebih bernilai tambah.

6. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pendukung

Pengawasan Terhadap Kualitas Produk, menjamin kualitas produk yang dijual di pasar dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap standar produk agar produk lokal tetap memiliki daya saing tinggi.

7. Evaluasi dan Penyesuaian Strategi

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil capaian yang telah dicapai untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang ada. Dari hasil evaluasi, melakukan penyesuaian strategi atau program agar dapat lebih responsif terhadap perkembangan pasar dan kebutuhan pelaku usaha.

Dengan upaya-upaya tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan diharapkan dapat menjaga dan bahkan meningkatkan volume perdagangan, mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah, serta membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing mereka kedepannya.

**A. PERBANDINGAN REALISASI PENINGKATAN VOLUME PERDAGANGAN**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(Miliar Rupiah)	(Miliar Rupiah)	(%)
Peningkatan Volume Perdagangan	831.350	867.760*	104.38

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Peningkatan Volume Perdagangan pada tahun 2024 adalah **867.760**. Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sehingga indikator kinerja ini memiliki capaian **104.38%** atau termasuk capaian **Sangat Memuaskan**.

2. Perbandingan *Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan 2024.*

Perbandingan realisasi Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

**Peningkatan Volume Perdagangan  
Tahun 2022 s.d 2024**

<b>Realisasi 2022 (Miliar Rupiah)</b>	<b>Realisasi 2023 (Miliar Rupiah)</b>	<b>Realisasi 2024 (Miliar Rupiah)</b>
<b>751.050</b>	<b>867.760</b>	<b>867.760*</b>

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

Perkembangan capaian Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Peningkatan Volume Perdagangan sempat mencapai tertendah pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mulai masuk di Indonesia. Akan tetapi mulai mengalami kenaikan kembali sejak tahun 2021. Kenaikan tersebut menunjukkan terjadinya proses pemulihan.

Perbandingan realisasi Peningkatan Volume Perdagangan tahun 2024 dengan target akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Realisasi 2024  (Miliar Rupiah)</b>	<b>Target Akhir Renstra 2021-2026  (Miliar Rupiah)</b>	<b>Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026  (%)</b>
1	Peningkatan Volume Perdagangan	867.760*	911.650	95.19

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja tahun 2024 menggunakan angka rilis BPS tahun 2023 telah mencapai target di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2026 masih belum tercapai. Sehingga capaian indikator kinerja ini memiliki capaian **95.19%** atau termasuk capaian **Sangat Memuaskan**.

## **B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Terwujudnya realisasi kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa kunci sukses keberhasilan yakni:

1. Dukungan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran yang meningkat setiap tahunnya.
2. Kemudahan akses transportasi yang mendukung mobilitas barang, seperti jalan yang baik.
3. Pengawasan dalam peningkatan sarana distribusi perdagangan untuk memastikan bahwa pasar-pasar yang dibangun atau diperbaiki benar-benar memenuhi standar kelayakan.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Pasar
  - a. Masih terdapat pasar di daerah yang belum memenuhi standar kelayakan karena fasilitas yang ada tidak memadai, seperti sanitasi yang buruk, ventilasi yang tidak cukup, serta fasilitas listrik dan air yang terbatas. Hal ini mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pasar.
  - b. Masih ada Bangunan pasar yang sudah tua dan rusak, hal ini menjadi kendala dalam memenuhi standar kelayakan pasar.

### 2. Permasalahan Lingkungan dan Sosial

Penyalahgunaan ruang pasar, masih terdapat pedagang menggunakan ruang pasar secara tidak sesuai, seperti menempati area yang seharusnya digunakan untuk fasilitas umum, yang mengurangi kenyamanan dan kebersihan pasar.

3. Kurangnya Sistem Manajemen dan Pengelolaan yang Profesional
  - a. Pengelolaan pasar yang lemah, seperti kurangnya perencanaan yang baik dan tata kelola yang tidak efisien, menyebabkan

ketidakteraturan dalam operasional pasar. Misalnya, masalah pengaturan pedagang, pengelolaan kebersihan, atau pemeliharaan fasilitas.

- b. Minimnya pembinaan bagi pengelola pasar mengenai manajemen pasar, kebersihan, dan pelayanan publik seringkali menjadi faktor yang menghambat pencapaian standar kelayakan.
4. Kurangnya Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat
    - a. Pedagang belum dilibatkan secara maksimal dalam pengelolaan pasar, juga tidak memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelayakan fasilitas, maka pasar sulit untuk memenuhi standar kelayakan. Peran serta pedagang dalam menjaga kualitas pasar sangat penting.
    - b. Masyarakat dan pedagang yang belum memahami pentingnya standar kelayakan pasar mungkin kurang peduli terhadap kebersihan, keamanan, dan perawatan pasar.

Hal yang harus dilakukan dalam rangka menjaga peningkatan volume perdagangan di Kabupaten Balangan yakni:

1. Peningkatan infrastruktur pasar yang berfokus pada pasar-pasar yang memiliki potensi pengunjung yang tinggi dalam penyediaan fasilitas dasar seperti penerangan, tempat sampah, dan aksesibilitas.
2. Peningkatan wawasan untuk pengelola pasar tentang manajemen pasar yang baik.
3. Mendorong kerjasama antara pedagang dan masyarakat agar bersama-sama dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar serta menciptakan pasar yang aman dan sehat bagi pengunjung.
4. Penerapan sistem pemantauan dan evaluasi berkala untuk memastikan pasar selalu memenuhi standar kelayakan. Jika ada kekurangan atau permasalahan, tindakan korektif dapat segera dilakukan.

### **C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Implementasi pemanfaatan atau penggunaan sumber daya terkait pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau tingkat efisiensi antara lain adalah efisiensi pengelolaan sumber daya input dan proses untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Dari

sisi input, penyusunan pohon kinerja berbasis isu strategis SKPD telah dilakukan dengan prinsip *logical framework* sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah benar-benar program yang menjawab kinerja yang diharapkan. Kemudian pada tatanan proses, SKPD juga telah melakukan penyusunan matrik resiko baik pada level resiko strategis maupun pada level resiko operasional.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/ anggaran. Bidang Pengembangan Perdagangan saat ini memiliki 5 orang ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right) \times 100 \%$$

Dalam penggunaan anggaran pada tahun 2024 jumlah pagu anggaran pada bidang Pengembangan Perdagangan yaitu sebesar Rp. 16.457.612.700 dan terealisasi sebesar Rp. 5.753.263.336. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program yaitu **65.04%** dengan persentase capaian IKU **104.38%**. Maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

**D. ANALISIS CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Untuk menunjang pencapaian target kinerja dilaksanakan program sebagai berikut:

1. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Peningkatan sarana distribusi perdagangan				

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase Pasar yang direvitalisasi</b>	<b>83.33 %</b>	<b>80.00</b>	<b>96.00</b>
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 unit	8	114.29
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 unit	10	100
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya</b>	<b>70.00 %</b>	<b>69.31</b>	<b>99.02</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1	100
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dokumen	1	100

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang pengembangan perdagangan tahun 2024 pada program peningkatan sarana distribusi perdagangan telah mencapai target yang diharapkan.

2. Program pengembangan ekspor dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengembangan ekspor				
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor	33.33 %	0.00	0.00
	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	5 Pelaku usaha	3	60.00
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	15 Pelaku usaha	15	100
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 Pelaku usaha	3	75.00

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang pengembangan perdagangan tahun 2024 pada program pengembangan ekspor tidak mencapai target yang diharapkan karena disebabkan oleh:

- a. Pelaku usaha yang telah dibina masih belum memahami secara mendalam tentang proses ekspor, termasuk dokumen yang diperlukan, prosedur yang harus dilalui, dan regulasi yang berlaku di pasar internasional.
- b. Pelaku usaha yang telah dibina terkadang kesulitan untuk menemukan jaringan distributor dan mitra bisnis yang dapat membantu memperluas pasar ekspor mereka, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- c. Sebagian produk pekau usaha yang telah dibina yang akan diekspor belum memiliki standar internasional yang diperlukan, sehingga kurang mampu bersaing di pasar global, baik dari segi kualitas maupun kemasan produk.

3. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>				
<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Nilai Transaksi Promosi Perdagangan</b>	<b>1,380,000,000 Rp</b>	<b>1,080,007,200</b>	<b>78.26</b>
	<b>Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas</b>	<b>33.33 %</b>	<b>47.37</b>	<b>142.12</b>
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi	20 UMKM	20	100

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang pengembangan perdagangan tahun 2024 pada program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri tidak mencapai target yang diharapkan karena fasilitasi pelaku usaha melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi yang mejadi target

fasilitasi baru berhasil menjalin kerjasama kemitraan dengan retail dan marketplace.

#### E. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar di kabupaten balangan yang memenuhi standar kelayakan pasar				
1	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	13,688,179,300	3,284,734,213	24.00	
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	148,799,400	130,395,000	87.63	
	Pengembangan ekspor	Persentase peningkatan pelaku usaha ekspor				
3	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	2,569,134,000	2,297,763,723	89,44	
	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan nilai produk lokal				
4	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas	51,500,000	40,370,400	78.39	
<b>JUMLAH</b>			<b>16,457,612,700</b>	<b>5,753,263,336</b>	<b>34.96</b>	

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Perdagangan tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan sebagai berikut:

1. Kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan ada 2 pekerjaan yang tidak terealisasi yaitu:
  - a. Pengadaan tanah untuk relokasi pasar lampihong
  - b. Pengadaan tanah untuk perluasan pasar modern paringin.
2. Kegiatan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya kurang maksimal dilaksanakan karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Bidang Pengembangan Perdagangan untuk melakukan pekerjaan secara maksimal.
3. Kegiatan penyelenggaraan promosi dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan ada silva anggaran yang tidak terealisasi yaitu:
  - a. Pengadaan cetak spanduk untuk publikasi event Balangan Expo yang sebagian disupport oleh pihak swasta (sponsorship)
  - b. Pengadaan makan minum kegiatan event Balangan Expo dan event Bazar UMKM sebagian disupport oleh Bagian Umum Setda Kab. Balangan
  - c. Pengadaan sewa stand dan dekor event disebabkan oleh adanya undangan yang tidak dapat berpartisipasi.
4. Kegiatan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri kurang maksimal dilaksanakan karena ada kesalahpahaman dari pejabat JF yang ditugaskan untuk membantu mengawal pelaksanaan yang berimbang pada rencana aksi yang dilakukan tidak terlalu tepat,

**Sasaran Strategis 2**  
Meningkatnya Perlindungan Konsumen

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Perlindungan Konsumen” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (Nilai)	Realisasi (Nilai)	Capaian (%)
----	-------------------	----------------	-------------------	-------------

1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0549	0.1275	232.24
---	---	--------	--------	--------

## 2.2. INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur peningkatan kegiatan perlindungan konsumen, Semakin tinggi pencapaian indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah akan menunjukkan nilai baik bagi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan.

$$\text{Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan} = (A \text{ Tahun } n - A \text{ Tahun } n - 1) + \text{Nilai mutlak } (B \text{ Tahun } n - B \text{ Tahun } n - 1) + (C \text{ Tahun } n - C \text{ Tahun } n - 1)$$

Keterangan:

A = Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai Ketentuan

B = Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok

C = Persentase UTTP dan Perlengkapannya yang bertanda tera sah

$$\text{Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan} = (23,63\% - 16,80\%) + (6,52\% - 7,51\%) + (34,87\% - 29,94\%)$$

$$= 0.1275 \%$$

Kabupaten

Balangan

Hasil capaian Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan adalah 0.1275. Merupakan hasil dari capaian realisasi tahun berjalan dikurang capaian realisasi tahun lalu atas indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok serta indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.

Untuk memenuhi target indikator Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan meningkatkan tertib perizinan sektor perdagangan berupa:
  - a. Sosialisasi perizinan berusaha sektor perdagangan
  - b. Fasilitasi perizinan kepada pelaku usaha dengan bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan.
2. Kegiatan meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting berupa:

- a. Melakukan pemantauan dan monitoring harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang ada dipasar sebanyak 67 kali pemantauan.
  - b. Melaksanakan operasi pasar sebanyak 68 (enam puluh delapan) kali di 8 (delapan) kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan dalam rangka pendendalian inflasi daerah.
3. Kegiatan meningkatkan tertib ukur dengan
- a. Melaksanakan tera tera ulang terdapat 25 (dua puluh lima) tempat usaha utama yaitu:
    - Pasar : 7 Pasar
    - SPBU : 3 SPBU
    - Pertashop : 9 Pertashop
    - Perusahaan : 5 Perusahaan
    - Desa : 1 Desa
  - b. Melaksanakan kegiatan pengawasan metrologi legal di 7 pasar dan 2 SPBU serta melaksanakan penyuluhan metrologi legal di 1 kecamatan.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis bagi aparatatur pemerintahan desa sehingga pendataan/pemutakhiran data pelaku usaha yang perlu/wajib memiliki NIB dan belum memiliki NIB bisa tepat sasaran.
2. Meningkatkan kinerja tim pemantauan harga atau tim pengendali inflasi daerah dalam menyikapi gejolak harga yang terjadi secara nasional agar tidak memperburuk inflasi daerah.
3. Pendataan pelaku usaha perdagangan serta mengaktifkan laporan resi gudang untuk mendata jumlah penyimpanan bahan pokok sebagai alternatif karena belum adanya distributor besar/Gudang penyimpanan bahan pokok di Kabupaten Balangan.
4. Mengatur jadwal pemantauan harga barang dan jadwal kegiatan pasar murah agar efektif dan tidak saling berbenturan.
5. Perbaikan dan perluasan layanan tera atau tera ulang serta melaksanakan layanan terhadap pasar-pasar yang belum dijangkau ditahun sebelumnya.
6. Melaksanakan tera ulang di pasar batumandi dan pasar paringin sebanyak dua kali di satu pasar serta membuka layanan tera /tera ulang di kantor.

## A. PERBANDINGAN REALISASI INDEX PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BALANGAN

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Nilai	Nilai	(%)
Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0549	0.1275	232.24

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024  
Realisasi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 adalah **0.1275**. Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sehingga indikator kinerja ini memiliki capaian **232.24%** atau termasuk capaian **Sangat Memuaskan**.

2. Perbandingan *Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan 2024.*

Perbandingan realisasi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

### Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan Tahun 2022 s.d 2024

Realisasi 2022 (Nilai)	Realisasi 2023 (Nilai)	Realisasi 2024 (Nilai)
<b>0.0567</b>	<b>0.0799</b>	<b>0.1275</b>

Perkembangan capaian Index Perlindungan Konsumen tahun 2022 ke tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan ditopang oleh (tiga) indikator yang ketiganya mengalami kenaikan disetiap pencapaian indicator, yaitu indikator persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai ketentuan, indikator persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga bahan pokok dan indikator persentase UTTP dan perlengkapannya yang bertanda tera sah.

Perbandingan realisasi Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan tahun 2024 dengan target akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir Renstra 2021-2026	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026

		(Nilai)	(Nilai)	(%)
1	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.1275	0.0578	220.59

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja tahun 2024 telah melebihi target di tahun 2024 dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2026 juga telah melebihi targetnya. Sehingga capaian indikator kinerja ini memiliki capaian **220.59%** atau termasuk capaian **Sangat Memuaskan**.

## **B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Terwujudnya realisasi kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa kunci sukses keberhasilan yakni:

1. Banyaknya pelaku yang mendaftarkan izin usahanya sesuai data yang terdapat pada aplikasi OSS-RBA, yaitu jenis usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/ supermarket/ hypermarket,
2. Adanya program pembiayaan modal usaha tanpa bunga dari Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Bank Kalsel Cabang Paringin serta BPR Kabupaten Balangan yang mensyaratkan legalitas izin usaha sebagai salah satu persyaratan.
3. Monitoring harga dilakukan secara rutin di beberapa pasar di Kabupaten Balangan antara lain pasar modern paringin, pasar batumandi, pasar lampihong, pasar bihara awayan dan pasar halong (sewaktu waktu) guna mengetahui data harga bahan pokok dipasar secara real time sebagai early warning komoditi yang harganya bergejolak dalam mendukung kerja tim pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi pangan. Adapun kegiatan pemantauan dilakukan sebanyak 67 kali pemantauan dari target sebesar 66 kali pemantauan dengan capaian kinerja koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok sebesar 6,52% berhasil lebih rendah dari yang ditargetkan di tahun 2024 sebesar 7.40%.
4. Kegiatan pasar murah diadakan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam upaya menekan angka inflasi daerah. Hal ini tercermin dalam kegiatan pasar murah yang dilaksanakan

disaat harga barang tertentu mengalami kenaikan harga maka dilakukan kegiatan pasar murah sebagai tindak lanjut mengendalikan inflasi daerah. Dalam kegiatannya banyak mendapat dukungan baik dari sektor pemerintah lainnya/ BUMN seperti Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dan Bulog serta dukungan juga oleh sektor swasta seperti Indofood, Wings, Mamasuka, dan Transmart.

5. Bertambahnya animo masyarakat dan pengusaha untuk menera ulang UTTP yang dimiliki karena gratis (tidak ada lagi biaya retribusi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebelumnya layanan tera ulang dikenakan biaya retribusi per alat UTTP sesuai dengan perda nomor 5 tahun 2013 tentang retribusi pelayanan tera ulang namun Retribusi tera ulang dihapuskan sejak tahun 2024.
6. Dibukanya layanan tera ulang di Kantor/Unit Metrologi Legal pada hari kerja dan jam kerja. UML Kabupaten Balangan sebelumnya hanya melayani sidang tera ulang dipasar pada jadwal tertentu saja yaitu, 7 kali dalam setahun dan kegiatan dilaksanakan ditriwulan IV akhir tahun.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini antara lain:

1. Kegiatan meningkatkan tertib perizinan sektor perdagangan
  - a. Rendahnya penguasaan teknologi Informasi dikalangan pelaku usaha sehingga belum dapat memanfaatkan fasilitas pengajuan permohonan secara online perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
  - b. Jauhnya jarak yang ditempuh oleh pelaku usaha dalam pengajuan permohonan perizinan berusaha ke instansi terkait bagi mereka yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendaftaran secara online.
  - c. Pelaku usaha masih khawatir dengan kewajiban pelaporan dan pembayaran perpajakan sehingga membuat pelaku usaha enggan untuk mendaftarkan legalitas usahanya.
2. Kegiatan meningkatkan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

- a. Kenaikan harga barang komoditas yang tidak bisa diantisipasi karena terjadi secara nasional disebabkan terjadinya kelangkaan barang komoditas didalam negeri sehingga rantai pasokan barang komoditas ke daerah juga terganggu.
- b. Belum adanya distributor besar/ gudang penyimpanan bahan pokok di Kabupaten Balangan sehingga rantai pasokan komoditas masih bergantung kepada kiriman pasokan dari kabupaten tetangga.
- c. Kurangnya varian barang jualan yang tersedia seperti varian beras lokal, daging sapi /daging ayam ras segar, daging sapi beku dan telur baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya masih belum mencakupi semua kebutuhan masyarakat Kabupaten Balangan.

3. Kegiatan meningkatkan tertib ukur

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga penera ahli dan reparatir ahli dalam menunjang kegiatan secara optimal. Tahun 2024 jumlah Potensi UTTP yang Wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten Balangan tercatat 3.636 buah, terdiri dari:

- a. 148 buah takaran,
- b. 3 buah tangka ukur,
- c. 1.244 timbangan, dan
- d. 2241 perlengkapannya

Jumlah tersebut hanya dapat dilayani sebesar 1.268 UTTP. Saat ini terdapat 2 orang tenaga penera dan tidak ada reparatir bersertifikasi. Setidaknya diperlukan 1 orang penera lagi yang telah mengikuti diklat fungsional, diklat teknis timbangan jembatan dan TUTSIT serta 2 orang reparatir yang telah mengikuti pelatihan reparatir.

Hal yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan index perlindungan konsumen di Kabupaten Balangan yakni:

1. Perlunya diadakan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik sekaligus fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di tempat kegiatan sosialisasi pada Tingkat kecamatan se-Kabupaten Balangan.
2. Perlunya sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintahan Desa mengenai perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik dalam rangka untuk mendukung kegiatan pendataan/ pemutakhiran data pelaku usaha yang perlu/

wajib memiliki NIB dan pendataan pelaku usaha yang belum memiliki NIB tepat sasaran.

3. Melaksanakan pasar murah secara rutin untuk menjaga stabilitas harga sembako untuk terus terkendali.
4. Mengajukan permohonan rekrutmen CPNS/ PPPK untuk tenaga JF penera ahli.
5. Mengikutsertakan SDM Kemetrolgian yang ada untuk mengikuti diklat reparatir.

### C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Implementasi pemanfaatan atau penggunaan sumber daya terkait pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau tingkat efisiensi antara lain adalah efisiensi pengelolaan sumber daya input dan proses untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Dari sisi input, penyusunan pohon kinerja berbasis isu strategis SKPD telah dilakukan dengan prinsip *logical framework* sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah benar-benar program yang menjawab kinerja yang diharapkan. Kemudian pada tatanan proses, SKPD juga telah melakukan penyusunan matrik resiko baik pada level resiko strategis maupun pada level resiko operasional.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran. Bidang Kemetrolgian dan Stabilisasi Harga saat ini memiliki 6 orang ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right) \times 100 \%$$

Dalam penggunaan anggaran pada tahun 2024 jumlah pagu anggaran pada bidang Kemetrolgian dan Stabilisasi Harga yaitu sebesar Rp. 2.193.021.800 dan terealisasi sebesar Rp. 1.943.434.688. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program yaitu **11,38%** dengan persentase capaian IKU **232.24%**. Maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

#### D. ANALISIS CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Untuk menunjang pencapaian target kinerja dilaksanakan program sebagai berikut:

1. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Perizinan dan pendaftaran perusahaan				
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	50 Buah	9	18.00
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1	100.00
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3 Buah	3	100.00
Fasilitasi Penerbitan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	3	100.00

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Tanda Daftar Gudang				
<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri</b>	<b>9 Buah</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9 Dokumen	0	0.00
<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan</b>	<b>3 Kali</b>	<b>1</b>	<b>33.33</b>
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	1	33.33

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)			
<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)</b>	<b>1 Buah</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1 Dokumen	0	0.00

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang kemetrolagian dan stabilisasi harga tahun 2024 pada program perizinan dan pendaftaran perusahaan tidak mencapai target yang diharapkan karena disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pekerjaan secara maksimal.

2. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>				

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66 Kali	67	101.52
	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	65 Kali	68	104.62
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12	100
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1	100

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang kemetrolgian dan stabilisasi harga tahun 2024 pada program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting telah mencapai target yang diharapkan.

3. Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Standardisasi dan perlindungan konsumen				

Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrolgian yang memperoleh sertifikasi teknis	1 Orang	2	200
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah	1300 Buah	1,268	97.54
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan	150 Buah	175	116.67
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	1300 Unit	1,268	97.54
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	50 Orang	44	88.00

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang kemetrolgian dan stabilisasi harga tahun 2024 pada program standardisasi dan perlindungan konsumen telah mencapai target yang diharapkan.

#### E. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan				
		Persentase jumlah kegiatan pengendali				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
		an fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya dilaksanakan				
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	75,600,000	65,957,071	87.24	
2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	60,000,000	17,130,000	28.55	
3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	41,150,000	23,045,500	56.00	
4	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan	50,000,000	1,382,000	2.76	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
5	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten /Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	50,000,000	1,930,000	3.86	
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok				
6	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1,172,019,100	1,135,716,418	96,90	
		Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah				
	Standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase jumlah kegiatan metrologi legal dilaksanakan				
		Persentase jumlah kegiatan pengawasan metrologi legal dilaksanakan				
7	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrolgian yang memperoleh sertifikasi teknis	744,252,700	698,273,699	93,82	
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang				

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
		dan Perlengkap annya (UTTP) bertanda Tera Sah				
		Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkap annya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan				
<b>JUMLAH</b>			<b>2,193,021,800</b>	<b>1,943,434,688</b>	<b>88.62</b>	

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Kemetrollogian dan Stabilisasi Harga tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pekerjaan secara maksimal.
2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pekerjaan secara maksimal.
3. Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pekerjaan secara maksimal.
4. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan dari 25 target sasaran pengawasan Bahan Berbahaya hasil koordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan bahwa di Kabupaten Balangan hanya memiliki 1 objek dari 25 target sasaran pengawasan Bahan Berbahaya sehingga mempengaruhi serapan anggaran kegiatan.

5. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan Kegiatan Sosialisasi Layanan Penerbitan SKA namun tidak jadi dilaksanakan dikarenakan adanya kegiatan FGD "**Langkah Awal Menembus Ekspor**" oleh Bidang Sarana Pengembangan Perdagangan dengan pokok bahasan, narasumber dan peserta yang sama dengan Sosialisasi Layanan Penerbitan SKA yang akan dilakukan.
6. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan adanya honor tim pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tidak dicairkan disebabkan oleh kekosongan dalam jabatan tim tersebut,
7. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan silva dari hasil dari negosiasi pengadaan barang/jasa di e-katalog/LPSE untuk belanja modal bangunan dan alat kemetrolgian.

**Sasaran Strategis 3**  
Meningkatnya Pendapatan IKM

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Pendapatan IKM” adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.68	1.70	101.19

**2.3. PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT**

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengidentifikasi jumlah IKM yang omzetnya meningkat.

$$\text{Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat} = \frac{\text{Jumlah IKM yang omzetnya meningkat di tahun N}}{\text{jumlah IKM di tahun N}} \times 100$$

$$\text{Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat} = \frac{42}{2.469} \times 100 = 1.70 \%$$

Hasil capaian Persentase IKM yang omzetnya meningkat adalah 1.70%. Merupakan hasil dari indentifikasi data IKM tahun 2024 yang omzetnya mengalami peningkatan dengan cara membandingkan jumlah produksi

dikali nilai jual produk ditahun N terhadap jumlah produksi dikali nilai jual produk ditahun N-1, sehingga kenaikan atau penurunan omzet IKM dapat terlihat.

Untuk memenuhi target indikator Persentase IKM yang omzetnya meningkat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melakukan program dan kegiatan pada tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pelatihan peningkatan kompetensi bagi IKM.
2. Pemberian bantuan mesin dan peralatan bagi IKM.
3. Fasilitasi sertifikasi halal produk bagi IKM.
4. Fasilitasi pendaftaran merek produk bagi IkM.
5. Partisipasi dalam pameran atau expo untuk mempromosikan produk-produk bagi IKM.

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2025 untuk mempertahankan/meningkatkan capaian, diantaranya:

1. Pengembangan kemampuan pelaku usaha industri sesuai kompetensi yang diperlukan.
2. Pendampingan terhadap pelaku usaha industri yang belum mahir menggunakan teknologi produksi.
3. Fasilitas berupa bantuan mesin dan peralatan bagi IKM mengacu pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) berbasis potensi sumber daya unggulan daerah.
4. Pengembangan sentra industri melalui sentra industri yang telah terbentuk secara alami.
5. Partisipasi dalam pameran atau expo serta menjalin kerja sama dengan instansi/pihak swasta terkait pengembangan produk IKM sesuai potensi pasar.

**A. PERBANDINGAN REALISASI PERSENTASE IKM YANG OMZETNYA MENINGKAT**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(%)	(%)	(%)
Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.68	1.70	101.19

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Realisasi Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat pada tahun 2024 adalah **1.70%**. Hal ini telah melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sehingga indikator kinerja ini

memiliki capaian **101.19%** atau termasuk capaian **Sangat Memuaskan**.

2. Perbandingan *Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023 dan 2024*.

Perbandingan realisasi Persentase IKM yang omzetnya meningkat tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

**Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat  
Tahun 2022 s.d 2024**

Realisasi 2022 (%)	Realisasi 2023 (%)	Realisasi 2024 (%)
	<b>1.18</b>	<b>1.70</b>

Perkembangan capaian Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat selama 2 (dua) tahun ini terus mengalami peningkatan. Adapun Jumlah perusahaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 2.421 IKM dengan jumlah IKM yang omzetnya meningkat sebesar 29 IKM sedangkan tahun 2024 Jumlah perusahaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Balangan tahun 2024 sebesar 2.469 IKM dengan jumlah IKM yang omzetnya meningkat sebesar 42 IKM.

Perbandingan realisasi Persentase IKM yang omzetnya meningkat tahun 2024 dengan target akhir renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2024 (%)	Target Akhir Renstra 2021-2026 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra 2021-2026 (%)
1	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.70	2.94	57.82

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja tahun 2024 telah mencapai target di tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2021-2026 masih belum tercapai. Namun demikian melihat perkembangan kinerja tiap tahun yang cenderung meningkat, maka target akhir renstra optimis dapat dicapai. Capaian indikator kinerja ini memiliki capaian **57.82%** atau termasuk capaian **Cukup Baik**.

## **B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Terwujudnya realisasi kinerja tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa kunci sukses keberhasilan yakni:

### 1. Pelatihan dan bantuan alat produksi

Peningkatan omzet para pelaku IKM dipengaruhi oleh faktor, yaitu jangkauan pemasaran yang luas dan jumlah produk yang berhasil dijual kepada konsumen. Untuk mendukung pertumbuhan peningkatan omzet para pelaku IKM, pelatihan dan bantuan alat produksi yang diberikan kepada para pelaku IKM sangat berperan penting dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah produk.

### 2. Fasilitasi sertifikasi halal pada produk

Sertifikasi halal pada produk menjadi faktor dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, mengingat masyarakat Kalimantan Selatan yang memiliki tingkat religiusitas tinggi. Dengan adanya sertifikasi ini, produk IKM akan lebih mudah diterima dipasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

### 3. Pendaftaran merek dagang

Pendaftaran merek dagang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku IKM, sehingga mereka tidak perlu khawatir terhadap penyebaran dan penggunaan merek mereka. Dengan merek yang telah terdaftar, produk mereka memiliki identitas yang jelas dan terlindungi secara hukum

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini antara lain:

### 1. Pelaku IKM yang telah mendapat peningkatan kompetensi/ pelatihan tidak melakukan inovasi terhadap produknya.

Meskipun telah mendapatkan pelatihan dan peningkatan kompetensi, inovasi produk dari IKM masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan dari pelatihan belum sepenuhnya diterapkan dalam pengembangan produk atau peningkatan nilai tambah produk.

### 2. Pelaku IKM telah menerapkan teknologi industri kedalam proses produksinya namun belum memiliki kualitas standar produk.

Meskipun para pelaku IKM telah mulai menerapkan teknologi industri dalam proses produksi, masih terdapat ketidak konsistenan

dalam kualitas produk yang dihasilkan. Perbedaan standar kualitas antar pelaku IKM dalam sektor yang sama menandakan bahwa belum ada standar baku yang diterapkan secara menyeluruh. Kondisi ini dapat berdampak pada daya saing produk di pasar, terutama jika konsumen lebih memilih produk yang memiliki kualitas terjamin dan konsisten

Hal yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan Persentase IKM yang omzetnya meningkat yakni:

1. Evaluasi dan pendampingan berkelanjutan

Pelaku IKM yang telah mendapatkan pelatihan, dilakukan evaluasi dan pendampingan berkelanjutan untuk mengidentifikasi kendala serta permasalahan yang mereka hadapi. Setelah kendala dan permasalahan tersebut ditemukan, dilakukan upaya penyelesaian melalui bimbingan teknis, pemberian solusi yang tepat, serta penguatan strategi inovasi dan pengembangan produk agar IKM dapat lebih optimal dalam meningkatkan daya saing usahanya.

2. Meningkatkan kualitas produk

untuk meningkatkan kualitas produk, dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap para pelaku IKM guna mengumpulkan berbagai data penting, mulai dari proses pemilihan bahan baku, teknik produksi, hingga strategi pemasaran produk. Pendataan ini bertujuan untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi kualitas produk serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku IKM.

Data yang telah dikompilasi tersebut kemudian dikaji lebih lanjut melalui diskusi dan evaluasi bersama para pelaku IKM, tenaga ahli, serta pihak terkait guna menetapkan standar bahan baku yang berkualitas, metode produksi yang efisien, dan standar kualitas produk akhir yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, diharapkan produk yang dihasilkan dapat lebih konsisten dalam hal kualitas, lebih kompetitif di pasar lokal maupun global, serta mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk IKM.

### **C. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Implementasi pemanfaatan atau penggunaan sumber daya terkait pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh beberapa faktor atau tingkat efisiensi antara lain adalah efisiensi pengelolaan sumber daya input dan proses untuk menghasilkan output atau outcome yang berkualitas. Dari

sisi input, penyusunan pohon kinerja berbasis isu strategis SKPD telah dilakukan dengan prinsip *logical framework* sehingga program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan adalah benar-benar program yang menjawab kinerja yang diharapkan. Kemudian pada tatanan proses, SKPD juga telah melakukan penyusunan matrik resiko baik pada level resiko strategis maupun pada level resiko operasional.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya personal dan sumber daya pembiayaan/anggaran. Bidang Perindustrian saat ini memiliki 4 orang ASN yang menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 \% - \left( \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \right) \times 100 \%$$

Dalam penggunaan anggaran pada tahun 2024 jumlah pagu anggaran pada bidang Perindustrian yaitu sebesar Rp. 8.531.522.200 dan terealisasi sebesar Rp. 6.908.748.736. Dapat disimpulkan realisasi keuangan ini tidak sampai 100%, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program yaitu **19.02%** dengan persentase capaian IKU **101.19%**. Maka dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2024 secara umum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya.

#### **D. ANALISIS CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN/ SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA**

Untuk menunjang pencapaian target kinerja dilaksanakan program sebagai berikut:

1. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
perencanaan dan pembangunan industri				
Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi	5 IKM	2	40.00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
industri Kabupaten/Kota	Sesuai Kebutuhan			
	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	325 IKM	325	100
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1 Dokumen	1	100

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang perindustrian tahun 2024 pada program perencanaan dan pembangunan industri telah mencapai target yang diharapkan. Namun dalam kegiatan pemenuhan IKM yang memiliki SDM yang bersertifikasi belum sesuai target yang diharapkan, karena belum adanya data tentang jenis-jenis IKM yang perlu sertifikat kompetensi dalam menunjang kegiatan produksi.

2. Program pengendalian izin usaha industri dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengendalian izin usaha industri				
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin	82 IKM	131	159.76

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	1	100

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang perindustrian tahun 2024 pada program pengendalian izin usaha industri telah mencapai target yang diharapkan.

3. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional dengan capaian output kegiatan/ sub kegiatan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan sistem informasi				

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
industri nasional				
Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM	273.62 Rp	262.89	96.08
	Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	146 IKM	146	100
Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1	100
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1	100

Output dari pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan bidang perindustrian tahun 2024 pada program pengelolaan sistem informasi industri nasional telah mencapai target yang diharapkan.

#### E. REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)
	Perencana an dan pembangu	Persentase IKM yang menerapkan			

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi		Realisasi Fisik
			(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
	nan industri	teknologi industri				
1	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten /Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	7,270,306,500	5,776,525,086	79,45	
	Pengendalian izin usaha industri	Persentase pertumbuhan IKM				
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten /Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin	106,805,200	104,770,171	98.09	
	Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase skala usaha IKM yang berkembang				
3	Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	1,154,410,500	1,027,453,479	89,00	
<b>JUMLAH</b>			<b>8,531,522,200</b>	<b>6,908,748,736</b>	<b>80.98</b>	

Pada pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian tahun 2024 realisasi fisik dan keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan disebabkan oleh kegiatan yang berasal dari usulan DPRD tidak dapat dilaksanakan terkendala pada belum lengkapnya berkas administrasi berupa proposal sehingga banyak belanja yang tidak bisa direalisasikan akibatnya penyerapan anggaran tidak bisa mencapai 100% yaitu:
  - a. Pengadaan Alat Pembuat Kue
  - b. Pengadaan Mesin Pembersih Bulu Ayam
  - c. Pengadaan Peralatan Meubel dan Furnitur
  - d. Pengadaan Mesin Pembuat Botol Plastik
  - e. Pengadaan Peralatan Bengkel Las
  - f. Pengadaan Pembuatan Mesin Paving
  - g. Pengadaan Depo Air Minum (Tempat Usaha dan Peralatan)
  - h. Pengadaan Mesin Vaving Blok Kelimpok Usaha Maju
2. Kegiatan penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha industri (IPUI), izin usaha kawasan industri (IUKI), dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota berbasis sistem informasi industri nasional (SIINas) kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan adanya perbedaan harga pasar dengan harga yang ada di DPA sehingga terjadi silva anggaran kegiatan.
3. Kegiatan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk iui, ipui, iuki, dan ipki kewenangan kabupaten/kota kurang maksimal dilaksanakan dikarenakan rencana perpindahan gedung operasional DEKRANASDA lama ke gedung operasional baru sehingga banyak belanja pengadaan barang ditunda untuk direalisasikan.

### **3. REALISASI ANGGARAN**

Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada tahun anggaran 2024 untuk Belanja sebesar **Rp. 37.870.902.392, -** dengan Realisasi sebesar **Rp. 24.334.483.301, -** atau **64.26%**. Untuk lebih jelas terkait pencapaian kinerja keuangan

berdasarkan rekening belanja dapat dilihat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut :

URAIAN	RENCANA		REALISASI	
	Rp.	%	Rp.	%
1	2	3	4	5
<b>Belanja Daerah</b>	<b>37.870.902.392</b>	<b>100</b>	<b>24.334.483.301</b>	<b>64,26</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>23.552.101.292</b>	<b>100</b>	<b>20.266.809.423</b>	<b>86,05</b>
Belanja Pegawai	5.424.219.042	100	4.798.002.958	88,46
Belanja Barang	18.127.882.250	100	15.468.806.465	85,33
<b>Belanja Modal</b>	<b>14.318.801.100</b>	<b>100</b>	<b>4.067.673.878</b>	<b>28,41</b>
Belanja Modal Tanah	10.000.000.000	100	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.750.040.700	100	2.521.006.100	91,67
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.568.760.400	100	1.546.667.778	98,59

Perbandingan realisasi anggaran tahun 2022 s.d 2024 adalah sebagai berikut:

**Realisasi Anggaran  
Tahun 2022 s.d Tahun 2024**

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
2022	12.935.563.605	12.003.695.706	92,80
2023	19,570,526,816	17,938,103,598	91.66
2024	37.870.902.392	24.334.483.301	64.26

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 ini realisasi capaian menurun karena ada 2 kegiatan pekerjaan yang tidak terealisasi yaitu:

1. Pengadaan tanah untuk relokasi pasar
2. Pengadaan peralatan usaha untuk dihibahkan/ diberikan kepada masyarakat.

sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Rincian anggaran beserta realisasi dari masing-masing program, kegiatan beserta sub kegiatan yang menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>10,688,745,692</b>	<b>100</b>	<b>9,729,036,541</b>	<b>91.02</b>	<b>959,709,151</b>	<b>8.98</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>66,227,000</b>	<b>100</b>	<b>58,424,400</b>	<b>88.22</b>	<b>7,802,600</b>	<b>11.78</b>
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	38,740,000	100	37,120,100	95.82	1,619,900	4.18
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi SKPD	27,487,000	100	21,304,300	77.51	6,182,700	22.49
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5,658,832,442</b>	<b>100</b>	<b>5,009,025,758</b>	<b>88.52</b>	<b>649,806,684</b>	<b>11.48</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,380,019,042	100	4,776,242,958	88.78	603,776,084	11.22
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	278,813,400	100	232,782,800	83.49	46,030,600	16.51
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>509,520,000</b>	<b>100</b>	<b>451,464,143</b>		<b>58,055,857</b>	<b>100.00</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	509,520,000	100	451,464,143	88.61	58,055,857	11.39
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>2,287,824,400</b>	<b>100</b>	<b>2,184,260,508</b>	<b>95.47</b>	<b>103,563,892</b>	<b>4.53</b>
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17,637,600	100	17,635,300	99.99	2,300	0.01
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1,436,544,700	100	1,345,819,600	93.68	90,725,100	6.32

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,986,200	100	59,319,250	98.89	666,950	1.11
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	56,707,600	100	56,695,100	99.98	12,500	0.02
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5,000,000	100	4,970,000	99.40	30,000	0.60
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	711,948,300	100	699,821,258	98.30	12,127,042	1.70
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,029,795,000</b>	<b>100</b>	<b>975,750,000</b>	<b>88.61</b>	<b>54,045,000</b>	<b>11.39</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,029,795,000	100	975,750,000	94.75	54,045,000	5.25
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>307,074,500</b>	<b>100</b>	<b>266,754,954</b>	<b>86.87</b>	<b>40,319,546</b>	<b>13.13</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179,861,400	100	143,418,954	79.74	36,442,446	20.26
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	127,213,100	100	123,336,000	96.95	3,877,100	3.05
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>829,472,350</b>	<b>100</b>	<b>783,356,778</b>	<b>94.44</b>	<b>46,115,572</b>	<b>5.56</b>
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	256,596,350	100	212,932,004	82.98	43,664,346	17.02
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	34,270,000	100	33,848,125	98.77	421,875	1.23

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	34,000,000	100	34,000,000	100.00	0	-
	Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	504,606,000	100	502,576,649	99.60	2,029,351	0.40
<b>B</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	<b>276,750,000</b>	<b>100</b>	<b>109,444,571</b>	<b>39.55</b>	<b>167,305,429</b>	<b>60.45</b>
<b>8</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>75,600,000</b>	<b>100</b>	<b>65,957,071</b>	<b>87.24</b>	<b>9,642,929</b>	<b>12.76</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	75,600,000	100	65,957,071	87.24	9,642,929	12.76
<b>9</b>	<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	<b>60,000,000</b>	<b>100</b>	<b>17,130,000</b>	<b>28.55</b>	<b>42,870,000</b>	<b>71.45</b>
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	60,000,000	100	17,130,000		42,870,000	100.00
<b>10</b>	<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>41,150,000</b>	<b>100</b>	<b>23,045,500</b>	<b>56.00</b>	<b>18,104,500</b>	<b>44.00</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	41,150,000	100	23,045,500	56.00	18,104,500	44.00
11	<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,382,000</b>	2.76	<b>48,618,000</b>	<b>97.24</b>
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	50,000,000	100	1,382,000	2.76	48,618,000	97.24
12	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100</b>	<b>1,930,000</b>	3.86	<b>48,070,000</b>	<b>96.14</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	50,000,000	100	1,930,000	3.86	48,070,000	96.14
<b>C</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>13,836,978,700</b>	<b>100</b>	<b>3,415,129,213</b>	<b>24.68</b>	<b>10,421,849,487</b>	<b>75.32</b>
13	<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>13,688,179,300</b>	<b>100</b>	<b>3,284,734,213</b>	<b>24.00</b>	<b>10,403,445,087</b>	<b>76.00</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	11,689,312,700	100	1,650,337,408	14.12	10,038,975,292	85.88
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1,998,866,600	100	1,634,396,805	81.77	364,469,795	18.23
<b>14</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>148,799,400</b>	<b>100</b>	<b>130,395,000</b>	<b>87.63</b>	<b>18,404,400</b>	<b>12.37</b>
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	62,819,700	100	55,735,000	88.72	7,084,700	11.28
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	85,979,700	100	74,660,000	86.83	11,319,700	13.17
<b>D</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>1,172,019,100</b>	<b>100</b>	<b>1,135,716,418</b>	<b>96.90</b>	<b>36,302,682</b>	<b>3.10</b>
<b>15</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>1,172,019,100</b>	<b>100</b>	<b>1,135,716,418</b>	<b>96.90</b>	<b>36,302,682</b>	<b>3.10</b>

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	241,376,600	100	224,227,200	92.90	17,149,400	7.10
	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	930,642,500	100	911,489,218	97.94	19,153,282	2.06
<b>E</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>2,569,134,000</b>	<b>100</b>	<b>2,297,763,723</b>	<b>89.44</b>	<b>271,370,277</b>	<b>10.56</b>
16	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,569,134,000	100	2,297,763,723	89.44	271,370,277	10.56
	Pameran Dagang Nasional	2,414,957,500	100	2,147,559,023	88.93	267,398,477	11.07
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	154,176,500	100	150,204,700	97.42	3,971,800	2.58
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>51,500,000</b>	<b>100</b>	<b>40,370,400</b>	<b>78.39</b>	<b>11,129,600</b>	<b>21.61</b>
17	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	51,500,000	100	40,370,400	78.39	11,129,600	21.61
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	51,500,000	100	40,370,400	78.39	11,129,600	21.61

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
<b>G</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>744,252,700</b>	<b>100</b>	<b>698,273,699</b>	<b>93.82</b>	<b>45,979,001</b>	<b>6.18</b>
18	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	744,252,700	100	698,273,699	93.82	45,979,001	6.18
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	601,503,700	100	555,917,900	92.42	45,585,800	7.58
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	142,749,000	100	142,355,799	99.72	393,201	0.28
<b>H</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>7,270,306,500</b>	<b>100</b>	<b>5,776,525,086</b>	<b>79.45</b>	<b>1,493,781,414</b>	<b>20.55</b>
19	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	7,270,306,500	100	5,776,525,086	79.45	1,493,781,414	20.55
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7,270,306,500	100	5,776,525,086	79.45	1,493,781,414	20.55
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>106,805,200</b>	<b>100</b>	<b>104,770,171</b>	<b>98.09</b>	<b>2,035,029</b>	<b>1.91</b>
20	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	106,805,200	100	104,770,171	98.09	2,035,029	1.91

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		REALISASSI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	2	3		4		5	
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	106,805,200	100	104,770,171	98.09	2,035,029	1.91
<b>J</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>1,154,410,500</b>	<b>100</b>	<b>1,027,453,479</b>	<b>89.00</b>	<b>126,957,021</b>	<b>11.00</b>
<b>21</b>	<b>Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>1,154,410,500</b>	<b>100</b>	<b>1,027,453,479</b>	<b>89.00</b>	<b>126,957,021</b>	<b>11.00</b>
	Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	244,910,000	100	243,141,239	99.28	1,768,761	0.72
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	909,500,500	100	784,312,240	86.24	125,188,260	13.76
<b>JUMLAH</b>		<b>37,594,152,392</b>	<b>100</b>	<b>24,225,038,730</b>	<b>64.44</b>	<b>13,369,113,662</b>	<b>35.56</b>

Apabila diklasifikasi berdasarkan alokasi anggaran dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis, maka realisasi anggaran tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		EFISIENSI KEUANGAN	
			(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	5	6		7	
1	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	16,457,612,700	5,753,263,336	34.96	10,704,349,364	65.04
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	2,193,021,800	1,943,434,688	88.62	249,587,112	11.38
3	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkatkan	8,531,522,200	6,908,748,736	80.98	1,622,773,464	19.02

#### 4. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah dicapai. Dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Sedangkan analisis efisiensi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat capaian sasaran beserta indikator yang ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya (*input*) tertentu, khususnya anggaran yang dialokasikan. Semakin tinggi anggaran yang dikeluarkan untuk mencapai target kinerja, maka tingkat efisiensi akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja, maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai.

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap capaian sasaran strategis pada tahun 2024, 3 (tiga) IKU dapat disimpulkan **“Efektif” dan “Efisien”**. Simpulan didapat setelah melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dengan realisasi anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024. Adapun rincian pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap capaian kinerja sasaran strategis I(KU) dapat dilihat sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
				K	%	%	
1	2	3	4	5		6	7
1	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	831.350	867.760*	104.38	34.96	69.42
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.0549	0.1275	232.24	88.62	143.62
3	Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	1.68	1.70	101.19	80.98	20.21
				<b>Rata-Rata</b>	<b>145.94</b>	<b>68.19</b>	<b>77.75</b>

**Keterangan :**

\* : Realisasi menggunakan realiasi tahun 2023

BPS, Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

Berdasarkan hasil pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap capaian rata-rata sub kegiatan (*output*) dan capaian rata-rata program (*outcome*) pada tahun 2024 dapat disimpulkan “**Efektif**” dan “**Efisien**”. Simpulan didapat setelah melakukan perbandingan capaian kinerja sub kegiatan (*output*) dan capaian kinerja program (*outcome*) dengan realisasi anggaran yang dialokasikan pada tahun 2024. Adapun rincian pengukuran efektivitas dan efisiensi terhadap capaian kinerja sub kegiatan dan capaian kinerja program dapat dilihat sebagai berikut:

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	78.20	%	72.15	92.26	10,688,745,692	9,729,036,541	91.02	1.24
	PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI	100	%	100	100.00			91.02	8.98
	NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	88.30	Nilai SKM	90.80	102.83			91.02	11.81
Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	100.00	100.00	66,227,000	58,424,400	88.22	11.78
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2	100.00	38,740,000	37,120,100	95.82	4.18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5	Laporan	5	100.00	27,487,000	21,304,300	77.51	22.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	100	%	100.00	100.00	5,658,832,442	5,009,025,758	88.52	11.48

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI
				KINERJA	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	437	Orang/bulan	437	100.00	5,380,019,042	4,776,242,958	88.78	11.22
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	Dokumen	12	100.00	278,813,400	232,782,800	83.49	16.51
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>509,520,000</b>	<b>451,464,143</b>	<b>88.61</b>	<b>11.39</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60	Orang	62	103.33	509,520,000	451,464,143	88.61	14.73
<b>Administrasi Umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Layanan Admintrasi Umum Perangkat Daerah yang baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2,287,824,400</b>	<b>2,184,260,508</b>	<b>95.47</b>	<b>4.53</b>
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1	Paket	1	100.00	17,637,600	17,635,300	99.99	0.01
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18	Paket	18	100.00	1,436,544,700	1,345,819,600	93.68	6.32
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	1	100.00	59,986,200	59,319,250	98.89	1.11

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket	2	100.00	56,707,600	56,695,100	99.98	0.02
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3	Dokumen	3	100.00	5,000,000	4,970,000	99.40	0.60
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	Laporan	1	100.00	711,948,300	699,821,258	98.30	1.70
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,029,795,000</b>	<b>975,750,000</b>	<b>94.75</b>	<b>5.25</b>
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	13	Unit	7	53.85	1,029,795,000	975,750,000	94.75	(40.91)
<b>Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>307,074,500</b>	<b>266,754,954</b>	<b>86.87</b>	<b>13.13</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1	Laporan	1	100.00	179,861,400	143,418,954	79.74	20.26

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1	laporan	1	100.00	127,213,100	123,336,000	96.95	3.05
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>829,472,350</b>	<b>783,356,778</b>	<b>94.44</b>	<b>5.56</b>
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50	Unit	50	100.00	256,596,350	212,932,004	82.98	17.02
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	92	Unit	92	100.00	34,270,000	33,848,125	98.77	1.23
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1	Unit	1	100.00	34,000,000	34,000,000	100.00	-
Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasaranap endukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	Unit	2	100.00	504,606,000	502,576,649	99.60	0.40

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	17.85	%	23.63	132.37	276,750,000	109,444,571	39.55	92.83
	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN (%)	100	%	100	100.00			39.55	60.45
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	50	Buah	9	18.00	75,600,000	65,957,071	87.24	(69.24)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumentasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	Dokumen	1	100.00	75,600,000	65,957,071	87.24	12.76
<b>Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang	<b>3</b>	<b>Buah</b>	<b>3</b>	<b>100.00</b>	<b>60,000,000</b>	<b>17,130,000</b>	28.55	<b>71.45</b>
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3	Dokumen	3	100.00	60,000,000	17,130,000	28.55	71.45
<b>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri</b>	<b>9</b>	<b>Buah</b>	-	-	<b>41,150,000</b>	<b>23,045,500</b>	<b>56.00</b>	<b>(56.00)</b>
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	9	Dokumen	-	-	41,150,000	23,045,500	56.00	(56.00)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI
				KINERJA	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan	3	Kali	1	33.33	50,000,000	1,382,000	2.76	30.57
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3	Laporan	1	33.33	50,000,000	1,382,000	2.76	30.57
<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</b>	<b>Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)</b>	1	Buah	-		50,000,000	1,930,000	3.86	(3.86)
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	1	Dokumen	-	-	50,000,000	1,930,000	3.86	(3.86)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR</b>	<b>10.00</b>	<b>%</b>	<b>2.05</b>	<b>20.45</b>	<b>13,836,978,700</b>	<b>3,415,129,213</b>	<b>24.68</b>	<b>(4.23)</b>
<b>Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan</b>	<b>Persentase Pasar yang direvitalisasi</b>	<b>83.33</b>	<b>%</b>	<b>80.00</b>	<b>96.00</b>	<b>13,688,179,300</b>	<b>3,284,734,213</b>	<b>24.00</b>	<b>72.01</b>
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	8	114.29	11,689,312,700	1,650,337,408	14.12	100.17
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10	unit	10	100.00	1,998,866,600	1,634,396,805	81.77	18.23
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya</b>	<b>70.00</b>	<b>%</b>	<b>69.31</b>	<b>99.02</b>	<b>148,799,400</b>	<b>130,395,000</b>	<b>87.63</b>	<b>11.39</b>
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	1	100.00	62,819,700	55,735,000	88.72	11.28

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen	1	100.00	85,979,700	74,660,000	86.83	13.17
<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK</b>	<b>7.40</b>	<b>%</b>	<b>6.52</b>	<b>88.11</b>	<b>1,172,019,100</b>	<b>1,135,716,418</b>	<b>96.90</b>	<b>(8.79)</b>
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	66	Kali	67	101.52	1,172,019,100	1,135,716,418	96.90	4.61
	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	65	Kali	68	104.62			96.90	7.71
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan	12	100.00	241,376,600	224,227,200	92.90	7.10

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	100.00	930,642,500	911,489,218	97.94	2.06
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR</b>	<b>50.00</b>	<b>%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,569,134,000</b>	<b>2,297,763,723</b>	<b>89.44</b>	<b>(89.44)</b>
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor	33.33	%	-	-	2,569,134,000	2,297,763,723	89.44	(89.44)
	Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	5	Pelaku usaha	3	60.00			89.44	(29.44)
Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang	15	Pelaku usaha	15	100.00	2,414,957,500	2,147,559,023	88.93	11.07
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4	Pelaku usaha	3	75.00	154,176,500	150,204,700	97.42	(22.42)
<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL</b>	<b>7.88</b>	<b>%</b>	<b>52.77</b>	<b>669.61</b>	<b>51,500,000</b>	<b>40,370,400</b>	<b>78.39</b>	<b>591.22</b>
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan	1,380,000,000	Rp	1,080,007,200	78.26	51,500,000	40,370,400	78.39	(0.13)

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas	33.33	%	47.37	142.12			78.39	63.73
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhorelan dan jasa akomodasi	20	UMKM	20	100.00	51,500,000	40,370,400	78.39	21.61
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	69.23	%	60.98	88.08	744,252,700	698,273,699	93.82	(5.75)
	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	25.00	%	21.95	87.80			93.82	(6.02)
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis	1	Orang	2	200.00	744,252,700	698,273,699	93.82	106.18
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah	1300	Buah	1,268	97.54			93.82	3.72
	Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT	150	Buah	175	116.67			93.82	22.84

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	<b>yang diawasi dan sesuai ketentuan</b>								
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan ditera ulang	1300	Unit	<b>1,268</b>	97.54	601,503,700	555,917,900	92.42	5.12
Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang dibina	50	Orang	<b>44</b>	88.00	142,749,000	142,355,799	99.72	(11.72)
<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>13.00</b>	<b>%</b>	<b>13.16</b>	<b>101.26</b>	<b>7,270,306,500</b>	<b>5,776,525,086</b>	<b>79.45</b>	<b>21.80</b>
Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan	5	IKM	2	40.00	7,270,306,500	5,776,525,086	79.45	(39.45)
	Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	325	IKM	325	100.00			79.45	20.55
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana distribusi	1	Dokumen	1	100.00	7,270,306,500	5,776,525,086	79.45	20.55
<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM</b>	<b>1.98</b>	<b>%</b>	<b>1.98</b>	<b>100.13</b>	<b>106,805,200</b>	<b>104,770,171</b>	<b>98.09</b>	<b>2.04</b>

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI
				KINERJA	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
1	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>	<b>Jumlah IKM yang Memiliki Izin</b>	<b>82</b>	<b>IKM</b>	<b>131</b>	<b>159.76</b>	<b>106,805,200</b>	<b>104,770,171</b>	<b>98.09</b>	<b>61.66</b>
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri	1	Dokumen	1	100.00	106,805,200	104,770,171	98.09	1.91

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG</b>	1.58	%	1.58	99.97	1,154,410,500	1,027,453,479	89.00	10.97
Penyediaan informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM	273.62	Rp	262.89	96.08	1,154,410,500	1,027,453,479	89.00	7.08
	Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	146	IKM	146	100.00			89.00	11.00

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI		ANGGARAN  (Rp)	REALISASI 'KEUANGAN		TINGKAT EFISIENSI  (%)
				KINERJA	(%)		(Rp)	(%)	
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	Dokumen	1	100.00	244,910,000	243,141,239	99.28	0.72
Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen gasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1	100.00	909,500,500	784,312,240	86.24	13.76
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)</b>		<b>100</b>		<b>91.19</b>	<b>91.19</b>	<b>37,870,902,392</b>	<b>24,334,483,301</b>	<b>64.26</b>	<b>26.93</b>
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Program) (%)</b>		<b>100</b>		<b>127.35</b>	<b>127.35</b>			<b>64.26</b>	<b>63.09</b>

## 5. ANALISIS KINERJA LAINNYA

Implementasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023 memperoleh nilai **72,15** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Nilai dan predikat tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Balangan serta dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024, nomor 700/169/Inspektorat-Blg/2024 tanggal 12 Agustus 2024. Berikut rincian hasil penilaian implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023 Kabupaten Balangan:

No	Komponen/Sub Komponen/kriteria	Nilai AKIP 2022		Nilai AKIP 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,50	30,00	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	21,90	30,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	15,00	10,80
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,75	25,00	18,75
Jumlah		100	<b>74,40</b>	100	<b>72,15</b>
Predikat AKIP			<b>BB</b>		<b>BB</b>

Nilai hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan terlihat menunjukkan penurunan nilai dibandingkan tahun 2022.

Inspektorat Kabupaten Balangan menemukan berbagai permasalahan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2023, walaupun secara umum disimpulkan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Permasalahan tersebut tersebar pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Sehingga Inspektorat menerbitkan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada masa yang akan datang. Adapun rekomendasi atau saran perbaikan beserta tindak lanjut yang dilakukan dapat dilihat sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>A</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
1	Membuat Rencana Aksi (Renaksi);	Membuat Rencana Aksi Tahun 2025
2	Membuat diagram pohon kinerja/ cascading SKPD yang selaras dengan Perjanjian Kinerja SKPD;	Membuat Pohon Kinerja dan Cascading Penyesuaian Renstra 2021-2026 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Membuat kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dengan menggunakan kata yang berorientasi hasil seperti meningkatnya, terciptanya, terwujudnya, menguatnya, dan lain sebagainya;	Membuat SK Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) dan Indikator Kinerja (Ik) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	Agar kedepannya membuat renaksi yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sertatarget yang harus dicapai setiap triwulan untuk mendukung setiap kinerja;	Membuat Rencana Aksi Tahun 2025
5	Melakukan pemantauan rencana aksi secara berkala dan dokumen monev agar ditandatangani oleh kepala SKPD;	Membuat Jadwal Pengukuran Kinerja, Monev dan Evaluasi
<b>B</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	
1	Membuat notulensi/ berita acara/ lembar monitoring evaluasi disertai daftar hadir yang ditandatangani oleh pimpinan SKPD;	Menyelenggarakan Rapat Pengukuran Kinerja, Monev dan evaluasi
2	Membuat jadwal/ dokumentasi kegiatan pengukuran kinerja disetiap triwulan;	Membuat dokumentasi kegiatan pengukuran kinerja, monev dan evaluasi
3	Menambahkan informasi faktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan/ rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target disetiap triwulan;	Menyampaikan informasi aktor pendorong, faktor penghambat dan rencana perbaikan/ rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak mencapai target disetiap triwulan
4	Membuat laporan Pengukuran Kinerja triwulan di internal SKPD	Menyusun Laporan Monev dan Evaluasi Kinerja Tahun 2025

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
<b>C</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
1	Agar kedepannya Dokumen LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) memberikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi;	Menyajikan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja SKPD dengan data realisasi capaian antar kabupaten /Kota dalam 1 (satu) Provinsi; (jika ada)
2	Menambahkan informasi gambaran umum mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai (Keterkaitan seksi, JF, dan pelaksananya terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);	Menyajikan informasi gambaran umum mengenai target kinerja dan anggaran dengan realisasinya dari pegawai (Keterkaitan seksi, JF, dan pelaksananya terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan) untuk mendukung capaian sasaran strategis pada Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
<b>D</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	
1	Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas LHE SAKIP tahun sebelumnya	Laporan hasil tindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas LHE SAKIP tahun sebelumnya

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan rata-rata capaian kinerja **145.94%**, meskipun begitu tetap membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif seluruh jajaran yang berada di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan agar capaian kinerja sasaran tersebut tidak mengalami penurunan kinerja. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tahun 2024 Secara keseluruhan dinyatakan "**Sangat Tinggi**", karena rata-rata capaian kinerja (seluruh program) sebesar **127.35%**.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator yang menunjang kinerja sasaran strategis tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja ditahun mendatang. Pertama, upaya dalam meningkatkan sektor industri lebih difokuskan kepada peningkatan pertumbuhan industri kecil menengah baru akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berhenti disitu saja, namun juga akan didukung dalam pengembangan dan pemberdayaan terhadap pelaku industri kecil dan menengah tersebut. Kedua upaya dalam meningkatkan sektor perdagangan lebih difokuskan kepada peningkatan sarana dan prasarana perdagangan sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta peningkatan jaringan pemasaran produk lokal daerah tidak hanya dipasar lokal saja namun bisa menembus pasar antar pulau bahkan pasar ekspor.

## LAMPIRAN